

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 215/KEP/E2/2022
TENTANG
PERUMUSAN KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM
KONTEKS KESEHATAN REPRODUKSI

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan program strategis untuk meningkatkan capaian kesertaan ber-KB, diperlukan perumusan kebijakan dan rekomendasi dengan melakukan berbagai kajian dan analisis situasi untuk menentukan arah, kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Keluarga Berencana dalam konteks Kesehatan Reproduksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perumusan Kajian Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- e. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
- f. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUMUSAN KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM KONTEKS KESEHATAN REPRODUKSI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Perumusan Kajian Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perumusan Kajian Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi.
2. Mekanisme penyusunan kajian akademis dan landasan hukum bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

KETIGA : Tim Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu), bertujuan untuk melakukan kajian terhadap konsep kajian Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi yang telah disusun oleh konsultan yang dibiayai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

KEEMPAT : Tim Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam konteks Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu), meliputi:

1. Tim Kajian Landasan Hukum dan Rancangan Teknokratik Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan

Reproduksi;

2. Tim Kajian Data Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi; dan
3. Tim Komunikasi dan Kajian Akademik bersama Perguruan Tinggi.

KELIMA : Tim Kajian Landasan Hukum dan Rancangan Teknokratik Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum EMPAT angka 1(satu) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi landasan hukum yang terkait dengan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. melakukan kajian landasan hukum yang memperkuat peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. melakukan kajian rancangan Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi; dan
- d. menyusun arah, kebijakan, dan strategi pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi kedepan.

KEENAM : Tim Kajian Data Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 2 (dua) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi data yang terkait dengan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. melakukan kajian data capaian program dan data yang menunjukkan keberhasilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. melakukan analisis situasi dinamika program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- d. menyusun hasil kajian data yang memperkuat peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

- KETUJUHH Tim Komunikasi dan Kajian Akademik bersama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 3 (tiga) mempunyai tugas:
- a. melakukan komunikasi tentang kajian Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dalam konteks Kesehatan Reproduksi dengan pakar dan lintas sektor terkait;
 - b. melakukan advokasi untuk dukungan pakar dan mitra kerja terkait dalam penguatan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - c. menyusun kajian akademik bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bersama mitra perguruan tinggi.

KEDELAPAN : Mekanisme Penyusunan kajian akademis dan landasan hukum bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 (dua) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEP/E2/2022
TENTANG
PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA
BERENCANA DALAM KONTEKS KESEHATAN
REPRODUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA
BERENCANA DALAM KONTEKS KESEHATAN REPRODUKSI

- A. Pengarah : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- B. Tim Kajian Landasan Hukum dan Rancangan Teknokratik Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi, bertugas
1. Ketua : Ir. Siti Fathonah, MPH
(PKB Ahli Utama)
 2. Anggota :
 - 1) Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si
(Sekretaris Utama)
 - 2) Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd
(Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi)
 - 3) dr. Eni Gustina, M.PH
(Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)
 - 4) dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid.
(Direktur Bina Akses Pelayanan KB)
 - 5) H. Nofrijal, SP, MA
(PKB Ahli Utama)
 - 6) Drs. Eli Kusnaeli, MM.Pd
(PKB Ahli Utama)
 - 7) Dr. Sudibyo Alimoeso, MA
 - 8) Drs. Eddy Hasmi, M.Sc

C. Tim Kajian Data Bidang Keluarga Berencana dalam Konteks Kesehatan Reproduksi

1. Ketua : Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk)
2. Anggota :
 - 1) Lina Widyastuti, SKM, MAPS
(Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik)
 - 2) Dr. Faharuddin, SST, M.Si
(Direktur Analisis Dampak Kependudukan)
 - 3) dr. Fajar Firdawati
(Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus)
 - 4) dr. Irma Ardiana, MAPS
(Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak)
 - 5) Martin Suanta, SE, M.Si
(Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB)
 - 6) Aris Firmanto, SE, MSR
(Plt. Kepala Biro Perencanaan)

D. Tim Komunikasi dan Kajian Akademik bersama Perguruan Tinggi

1. Ketua : Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD
(Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan)
2. Anggota :
 - 1) Dr. Ir Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip. Com
(PKB Ahli Utama)
 - 2) Safrina Salim, SKM, M.Kes
(Direktur Bina Kesehatan Reproduksi)
 - 3) Prof. dr. Budi Utomo, MPH, Ph.D
 - 4) Prof. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D
 - 5) dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG (K)
 - 6) dr. Muljo Hadi Sungkono, Sp.OG (K)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO